



Renja Perubahan



20
24

**DINAS SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KOTA DUMAI**

Jalan Sultan Syarif Kasim Nomor 11 Buluh
Kasap, Dumai Timur, Dumai

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur Kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai merupakan acuan perencanaan kegiatan OPD sampai dengan akhir tahun anggaran yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Dumai Tahun 2024 serta Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2021-2026. Renja Perubahan ini dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Perubahan Anggaran Tahun 2024.

Rencana kerja sesungguhnya merupakan dokumen resmi daerah yang mengarahkan pelayanan OPD sesuai dengan visi, misi, kebijakan, strategi dan program pembangunan Kota Dumai, sehingga diharapkan tingkat pelayanan OPD atas tugas umum pemerintahan dan tugas-tugas pembangunan dapat lebih optimal.

Kami sadari bahwa dalam penyusunan Renja Perubahan ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu kami mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna penyempurnaan Renja Perubahan di masa yang akan datang.

Dumai, 2024

KEPALA,

drg. HERMIYATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19711229 200012 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	
1.5 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD...	5
1.6 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023 Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan.....	7
1.7 Analis Kinerja Pelayanan OPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	20
1.8 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	21
2.1 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
BAB III PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	43
BAB IV PENUTUP	
Penutup	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA OPD) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024 merupakan Dokumen Perencanaan SKPD Dinas Sosial untuk periode satu tahun, yang disusun berdasarkan Rencana Strategis SKPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai 2021-2026 yang diselaraskan dengan masukan dan aspirasi dari pelaku pembangunan yang disampaikan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat desa/kelurahan sampai tingkat kota, dan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja OPD pada tahun sebelumnya dan tahun sedang berjalan.

Rencana Kerja Perubahan OPD adalah dokumen perubahan perencanaan OPD yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan untuk periode 1 (satu) semester atau progress kegiatan pada triwulan I (satu) dan triwulan II (dua) yang dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai berkewajiban menyusun Renja Perubahan 2024, sebagai satu kesatuan system perencanaan pemerintah provinsi dan nasional. Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024, berperan penting dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Tahun 2024, serta menjadi dasar untuk penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024.

Renja Perubahan ini disusun dengan melibatkan semua unit kerja pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan harapan program dan kegiatan yang diusulkan berdasarkan skala prioritas sesuai aspirasi program dan kegiatan masing-masing unit kerja dan menjaring masukan dari hasil musrenbang kecamatan serta stake holder lainnya. Disamping itu juga melalui Rencana Kerja perubahan Tahun 2024 ini diharapkan akan memudahkan bagi seluruh pegawai untuk mencapai tujuan dinas secara terpadu, terarah dan terukur.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai merupakan dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada bagian sekretariat dan bidang teknis yang ada pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai untuk Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tahun 2024 didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku diantaranya:

1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang RI nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Presiden nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019;
7. Peraturan Presiden nomor 46 tahun 2015 tentang Kementrian Sosial (Lembaran Negara RI tahun 2015 nomor 86);
8. Peraturan pemerintah RI nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita negara RI tahun 2010 nomor 517);

11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja;
12. Peraturan Menteri Sosial RI nomor 27 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial RI tahun 2015-2019;
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau tahun 2014-2019;
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Pemerintah Kota Dumai tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai;
16. Peraturan Walikota Dumai Nomor 34 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penetapan Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai disusun dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai acuan dokumen perencanaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang sosial yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan yang memuat:

A. Latar Belakang

- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan serta
- D. Sistematika penulisan Renja OPD.

- BAB II : Evaluasi pelaksanaan Renja OPD sampai dengan triwulan II Tahun 2024 yang memuat:
- A. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan IKU sampai dengan Triwulan II
 - B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - C. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
 - D. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan provinsi
- BAB III : Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- BAB IV : Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebelum menyusun rencana program dan kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024. Perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 Triwulan II (dua) dan identifikasi faktor-faktor yang mendukung pencapaian target maupun hambatan/kendala yang menyebabkan target tidak tercapai. Evaluasi kinerja didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan penjabaran dari sasaran strategis Renstra Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2021-2026, yaitu Meningkatnya kesejahteraan Sosial Masyarakat.

A. Bidang Rehabilitasi Sosial

Dalam meningkatkan kinerja pelayanan, Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan kegiatan:

1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal,
2. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial,

Tujuan dari kegiatan ini adalah memulihkan fungsi sosial, memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial para PPKS, termasuk bagi lanjut usia terlantar, penyandang cacat, dan anak terlantar untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

B. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Dalam meningkatkan kinerja pelayanan, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan kegiatan:

1. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar,

2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota,
3. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota,
4. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi dirinya dari bencana dan kehilangan pendapatan serta memberikan perlindungan kepada keluarga miskin dan memberikan jaminan sosial. Jaminan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Bantuan Sosial Pangan (BSP) serta memberikan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam, serta memberikan jaminan sosial bagi PPKS.

C. Bidang Pemberdayaan Sosial

Dalam meningkatkan kinerja pelayanan, Bidang Pemberdayaan Sosial melaksanakan kegiatan:

1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota,
2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan aksesibilitas dan pemberdayaan bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Meningkatkan profesionalisme dan kemandirian SDM dalam mendukung kinerja penanganan masalah sosial serta kepedulian terhadap Makam Pahlawan agar menjadi lebih tertata bersih dan indah, sebagai wujud penghormatan dan penghargaan terhadap jasa-jasa para pahlawan/pejuang.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Dalam meningkatkan kinerja pelayanan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan kegiatan:

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa,
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Tujuan dari kegiatan ini adalah Meningkatkan Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Pada Tahun Anggaran 2024 Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai anggaran sebesar **Rp.27.649.042.320,-** yang digunakan untuk membiayai 8 (delapan) program dan 16 (enam belas) kegiatan yang bersumber dari APBD Kota Dumai, dengan jumlah realisasi sampai dengan triwulan II (dua) Rp.3.984.181.302,- atau persentase realisasi sebesar 14,41% per Tanggal 31 Mei 2024. Penjelasan pencapaian realisasi pelaksanaan program kegiatan sebagai berikut:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan 8 (Delapan) Kegiatan dari anggaran Rp. 6.108.840.160,- realisasi anggaran pada triwulan II sebesar Rp. 2.363.906.365,- atau 38,7%, dengan rincian Kegiatan sebagai berikut:
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 18.900.000,- realisasi pada triwulan II sebesar Rp. 10.612.500,- atau 56,15%.
 2. Administrasi Keuandangengan anggaran sebesar Rp. 4.313.940.860,- realisasi pada triwulan II sebesar Rp. 1.716.816.103,- atau 39,80%.
 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 16.200.000,- realisasi pada triwulan II sebesar Rp. 8.100.000,- atau 50%.
 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 11.000.000,- realisasi pada triwulan II sebesar Rp. 0,- atau 0 %.
 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 283.043.600,- realisasi pada triwulan II sebesar Rp. 120.297.573,- atau 42,5%.

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran Rp. 145.507.900,- realisasi pada triwulan II sebesar Rp. 16.180.000,- atau 11,12%.
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.119.940.440,- realisasi pada triwulan II sebesar Rp. 415.391.055,- atau 37,09%.
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 200.307.360,- realisasi pada triwulan II sebesar Rp.76.509.134,- atau 38,2%.
 - Program Pemberdayaan Sosial dengan 1 (satu) Kegiatan dari anggaran Rp. 788.906.460,- realisasi anggaran pada triwulan II sebesar Rp.339.647.900,- atau 43,05% dengan rincian Kegiatan sebagai berikut:
 1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kotadengan anggaran sebesar Rp. 788.906.460,- realisasi pada triwulan II sebesar Rp. 339.647.900,- atau 43,05%.
 - Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan 1 (satu) kegiatan dari anggaran Rp.10.000.000,- realisasi anggaran pada triwulan II sebesar Rp. 5.650.000,- atau 56,50% dengan rincian Kegiatan sebagai berikut:
 1. Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal dengan anggaran sebesar Rp.10.000.000,- realisasi anggaran pada triwulan II sebesar Rp. 5.650.000,- atau 56,50%.
 - Program Rehabilitasi Sosial dengan 1 (satu) Kegiatan dari anggaran sebesar Rp. 805.000.000,- realisasi anggaran pada triwulan II sebesar Rp. 463.364.863,- atau 57,56% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 1. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan anggaran sebesar Rp. 805.000.000,- realisasi anggaran pada triwulan II sebesar Rp. 463.364.863,- atau 57,56%.

- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial dengan 1 (Satu) Kegiatan dari anggaran sebesar Rp. 17.297.764.000,- realisasi anggaran pada triwulan II sebesar Rp. 206.255.900,- atau 1,19% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 1. Pemeliharaan Anak - Anak Terlantar dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- pada triwulan II dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 0,- atau 0,00%.
 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 17.147.764.000,- pada triwulan II dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 206.255.900,- atau 1,20%.

- Program Penanganan Bencana dengan 2 (dua) Kegiatan dari anggaran sebesar Rp. 627.277.000,- realisasi anggaran pada triwulan II sebesar Rp. 122.134.000,- atau 19,47% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 1. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesarRp.150.000.000,- pada triwulan II dengan realisasi anggaran sebesarRp.70.621.000,- atau 47,08%.
 2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesarRp.477.277.000,- pada triwulan II dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 51.513.000,- atau 10,79%.

- Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan 1 (satu) Kegiatan dari anggaran sebesar Rp.51.854.700,- realisasi anggaran pada triwulan II sebesar Rp.28.486.400,- atau 68,06% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp.41.854.700,- realisasi anggaran pada triwulan II sebesar Rp. 28.485.400,- atau 68,09%.

- Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan 1 (satu) kegiatan dari anggaran sebesar Rp. 270.000.000,- pada triwulan II dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.226.800,- atau 10,45% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa dengan anggaran sebesar Rp. 270.000.000,- realisasi anggaran pada triwulan II sebesar Rp. 28.226.800,- atau 10,45%.
 - Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan 1 (satu) kegiatan dari anggaran sebesar Rp. 1.699.400.000,- pada triwulan II dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 426.509.074,- atau 25,10% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp. 1.699.400.000,- pada triwulan II dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 426.509.074,- atau 25,10%.

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dilakukan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan suatu program/ kegiatan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai maupun RPJMD Kota Dumai. Sedangkan evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan TW II dilakukan untuk memastikan agar target-target program/kegiatan yang ditetapkan di dalam Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024 dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan pada akhir tahun 2024.

Pada Tabel 2.1 berikut terlampir hasil evaluasi Renja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II (dua).

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pencapaian Triwulan II
Kota Dumai

No	Sasaran RKP	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD sampai dengan RKP Tahun 2023	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2024 yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan																Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKP yang dievaluasi (2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKP Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d Tahun 2023/Akhir Tahun Pelaksanaan RKP Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d tahun 2024 (%)	SKPD Penanggungjawab	
							I		II		III		IV		12		13=12/7x100%		14 = 6 + 12		15=14/5 x 100%							16
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				6.108.840.160											2.363.906.365	38,70%	2.347.726.365					DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				18.900.000											10.612.500	56,15%	10.612.500									
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2	Dokumen										2	1.999.500	100,00%	95,21%	2,00	1.999.500	0,00%	0,00%				
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1	Dokumen									1	1.995.000	100,00%	95,00%	1,00	1.995.000	0,00%	0,00%					
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1	Dokumen								-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1	Dokumen								1	1.998.000	100,00%	95,14%	1,00	1.998.000	0,00%	0,00%						
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1	Dokumen								-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			2	Laporan								1,5	4.620.000	75,00%	73,33%	1,50	4.620.000	0,00%	0,00%						
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3	Dokumen								-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%						

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.313.940.860		912.917.605		803.898.498				1.716.816.103		39,80%		1.716.816.103		-	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					4.309.890.860	6,50	912.917.605	5,50	801.948.498			12,00	1.714.866.103	41,38%	39,79%	12,00	1.714.866.103	0,00%	0,00%	
	Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1.950.000			2	1.950.000		2	1.950.000	100,00%	100,00%	2,00	1.950.000	0,00%	0,00%		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					2.100.000			2						0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						16.200.000		4.050.000		4.050.000				8.100.000		50,00%		8.100.000		-	
	Penabsahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penabsahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					16.200.000	0,25	4.050.000	0,25	4.050.000		0,50	8.100.000	50,00%	50,00%	0,50	8.100.000	0,00%	0,00%		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						11.000.000										0,00%				0,00%	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan					11.000.000			10							0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						283.043.600		71.900.175		48.397.398				120.297.573		42,50%		120.297.573		-	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					2.246.000	1	2.121.000				1,00	2.121.000	100,00%	94,43%	1,00	2.121.000	0,00%	0,00%		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					58.064.100	2	29.287.900	0,40	5.375.000		2,40	34.662.900	60,00%	59,70%	2,40	34.662.900	0,00%	0,00%		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					7.057.100	4	6.635.500				4	6.635.500	100,00%	94,03%	4,00	6.635.500	0,00%	0,00%		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					34.719.400	1,05	3.012.000	1,15	3.347.000		2,20	6.359.000	18,33%	18,32%	2,20	6.359.000	0,00%	0,00%		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan					20.821.000	1,15	5.775.000	0,50	2.580.000		1,65	8.355.000	41,25%	40,13%	1,65	8.355.000	0,00%	0,00%		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan					13.830.000			0,15	1.800.000		0,15	1.800.000	15,00%	13,02%	0,15	1.800.000	0,00%	0,00%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					146.306.000	0,18	25.068.775	0,24	35.295.398		0,42	60.364.173	42,00%	41,26%	0,42	60.364.173	0,00%	0,00%		

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah															145.507.900										16.180.000				11,12%		16.180.000			0,00%															
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan															15.243.200																																	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan															130.264.700			5											5	16.180.000																		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																1.119.940.440		176.417.539												415.391.055				37,09%		415.391.055													
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat															1.500.000																		0,00%		0,00%		0,00											
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan															129.345.000	0,36	22.857.539	0,22					0,58		36.944.295	29,00%		28,56%		0,58	36.944.295			0,00%		0,00%												
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan															20.000.000																		0,00%		0,00%		0,00											
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan															969.095.440	0,16	153.560.000	0,24					0,40		378.446.760	40,00%		39,05%		0,40	378.446.760			0,00%		0,00%												
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																200.307.360		39.706.344												76.509.134				38,20%		76.509.134													
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya															35.000.000	0,52	9.000.000	0,43					0,95		15.000.000	47,50%		42,86%		0,95	15.000.000			0,00%		0,00%												
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya															136.757.360	2,80	27.106.344	2,75					5,55		54.179.134	39,64%		39,62%		5,55	54.179.134			0,00%		0,00%												
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara															28.550.000	6,00	3.600.000	6					12,00		7.330.000	26,67%		25,67%		12,00	7.330.000			0,00%		0,00%												

		URUSAN PEMERINTAHAN																								
		BIDANG SOSIAL																								
		PROGRAM																								
		PEMBERDAYAAN SOSIAL						788.906.460									339.647.900		43,05%			136.606.000		-		
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						788.906.460		48.594.900			291.053.000				339.647.900		43,05%			136.606.000		-		
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						74	Orang	494.264.240		19	125.917.000		19,00	125.917.000		25,68%	25,48%	19,00	125.917.000		0,00%	0,00%	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota						7	Orang	44.644.320		2	10.689.000		2,00	10.689.000		28,57%	23,94%	2,00	10.689.000		0,00%	0,00%	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota						8.397	Keluarga	99.997.900	4.120	48.594.900	350	4.447.000		4.470	53.041.900		53,23%	53,04%	4470,00	53.041.900		0,00%	0,00%
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota						2	Lembaga	150.000.000		2	150.000.000		2	150.000.000		100,00%	100,00%	2,00	150.000.000		0,00%	0,00%	
		PROGRAM PENANGANAN																								
		WARGA NEGARA MIGRAN																								
		KORBAN TINDAK KEKERASAN						10.000.000									5.650.000		56,50%				5.650.000		-	
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						10.000.000		5.650.000							5.650.000		56,50%				5.650.000		-	
		Facilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota						10	Orang	10.000.000	6	5.650.000		6	5.650.000		60,00%	56,50%	6,00	5.650.000		0,00%	0,00%		

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL		805.000.000										463.364.863		57,56%		372.364.863				
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		805.000.000										463.364.863		57,56%		372.364.863				
Penyediaan Pemakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	100.000.000	33	32.800.000	12	11.400.000					45,00	44.200.000	45,00%	44,20%	45,00	44.200.000	0,00%	0,00%
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	30.000.000			85,00	25.291.500					85,00	25.291.500	85,00%	84,31%	85,00	25.291.500	0,00%	0,00%
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	100.000.000			100	91.000.000					100	91.000.000	100,00%	91,00%	100,00	91.000.000	0,00%	0,00%
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	30.000.000	20,0	5.673.400	13	4.150.000					33,0	9.823.400	33,00%	32,74%	33,00	9.823.400	0,00%	0,00%
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	250.000.000	37	92.119.963	19	46.755.000					56	138.874.963	56,00%	55,55%	56,00	138.874.963	0,00%	0,00%
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	100.000.000	53	52.359.000	14	14.106.000					67	66.465.000	67,00%	66,47%	67,00	66.465.000	0,00%	0,00%
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	25.000.000	6	1.500.000	64	16.000.000					70	17.500.000	70,00%	70,00%	70,00	17.500.000	0,00%	0,00%
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100	Orang	170.000.000	19	32.160.000	23	38.050.000					42	70.210.000	42,00%	41,30%	42,00	70.210.000	0,00%	0,00%

	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL							17.297.764.000											206.255.900		1,19%		206.255.900		-	
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar							150.000.000											-		0,00%				-	
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000											-		0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%
	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000																		
	Pemantuan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpenuhi dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota						50.000.000																		
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota							17.147.764.000	32.944.900		173.311.000							206.255.900		1,20%		206.255.900		-		
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata					135.761	Orang	100.000.000	18.000	12.913.300	11.000	8.183.000		29.000	21.096.300	21,36%	21,10%	29000,00	21.096.300	0,00%	0,00%				
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota					30.530	Keluarga	74.000.000																	
	Facilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial Kesejahteraan keluarga kewenangan kab/kota					2.696	Keluarga	16.973.764.000	4,00	20.031.600	26,00	165.128.000		30,00	185.159.600	1,11%	1,09%	30,00	185.159.600	0,00%	0,00%				
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA							627.277.000											122.134.000		19,47%		85.222.000		-	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota							150.000.000	57.669.000		12.952.000							70.621.000		47,08%		33.709.000		-		
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanaan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota					150	Orang	50.000.000	23	7.362.000	34,0	11.452.000		57	18.814.000	37,67%	37,63%	56,50	18.814.000	0,00%	0,00%				
	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakiaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					150	Orang	50.000.000	107	35.412.000	4,0	1.500.000		111	36.912.000	74,00%	73,82%	111,00	36.912.000	0,00%	0,00%				

	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota					150	Orang	50.000.000	45	14.895.000				45	14.895.000	30,00%	29,79%	45,00	14.895.000	0,00%	0,00%
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota								477.277.000		5.600.000					51.513.000		10,79%		51.513.000		-
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					1	Kampung	100.000.000							-	0,00%	0,00%	0,00		0,00%	0,00%
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					46	Orang	377.277.000	0,75	5.600.000	6,00	45.913.000		6,75	51.513.000	14,67%	13,66%	6,75	51.513.000	0,00%	0,00%
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN								41.854.700							28.486.400		68,06%		28.486.400		-
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota								41.854.700		10.000.000		18.486.400			28.486.400		68,06%		28.486.400		-
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota					55	Makam	41.854.700	14,00	10.000.000	24,00	18.486.400		38	28.486.400	69,09%	68,06%	38,00	28.486.400	0,00%	0,00%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																					
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA								270.000.000							28.226.800		10,45%		19.928.300		-
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa								270.000.000		8.990.000		19.236.800			28.226.800		10,45%		19.928.300		-
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa					36	Dokumen	170.000.000	2,00	8.990.000	2,25	10.938.300		4,25	19.928.300	11,81%	11,72%	4,25	19.928.300	0,00%	0,00%
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan					36	Dokumen	100.000.000			3	8.298.500		3	8.298.500	8,33%	8,30%	3,00	8.298.500	0,00%	0,00%

		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT								1.699.400.000													426.509.074	25,10%		271.029.774	-
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota								1.699.400.000	69.284.000		357.225.074										426.509.074	25,10%		271.029.774	-
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						36	Dokumen	1.099.400.000	0,35	9.619.000	8,65	261.410.774			9,00	271.029.774	25,00%	24,65%	9,00	271.029.774	0,00%	0,00%		
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya						36	Lembaga	150.000.000	5	20.570.000	5	20.700.000			10	41.270.000	27,78%	27,51%	10,00	41.270.000	0,00%	0,00%		
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						36	Dokumen	50.000.000	1	1.350.000					1	1.350.000	2,78%	2,70%	1,00	1.350.000	0,00%	0,00%		
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						36	Laporan	100.000.000	0,50	1.350.000	5,50	20.064.300			6,00	21.414.300	16,67%	21,41%	6,00	21.414.300	0,00%	0,00%		

		Fasilitasi Bulan Bhakti Gobong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gobong Royong Masyarakat					36	Laporan	100.000.000	4,50	12.310.000	1,50	6.820.000				6,00	19.130.000	16,67%	19,13%	6,00	19.130.000	0,00%	0,00%
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					50	Keluarga	100.000.000	2,50	4.520.000	12,75	25.830.000				15,25	30.350.000	30,50%	30,35%	15,25	30.350.000	0,00%	0,00%
		Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					50	Keluarga	100.000.000	10	19.565.000	11,00	22.400.000				21	41.965.000	42,00%	41,97%	21,00	41.965.000	0,00%	0,00%
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	14,46%	14,41%				
																			Predikat Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
										27.649.042.320									TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM	3.984.181.302	14,46%	14,41%			
																			PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM	Sangat Rendah	Sangat Rendah				

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan OPD Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan Analisis yang dilakukan adanya faktor yang berfungsi sebagai determinan atau penentu keberhasilan, faktor yang dimaksud adalah kemitraan antara Pemerintah Daerah dan pihak lain dalam setiap proses pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program serta perkembangannya kerjasama lintas sektor, dalam rangka memudahkan setiap pihak yang terkait untuk menilai target capaian kinerja pelayanan OPD dengan ini indikator yang digunakan adalah Indikator Kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kewenangan dan pembinaan pelayanan sosial, dengan indikator yang telah ditentukan dalam SPM Bidang Sosial sebagai berikut :

1. Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
2. Rehabilitasi sosial anak terlantar di luar panti;
3. Rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar panti;
4. Rehabilitasi sosial gelandangan dan pengemis di luar panti;
5. Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat.

Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat berpedoman pada Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Dumai dan disesuaikan dengan Peraturan Walikota Dumai Nomor 34 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai.

Adapun tugas dari Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai adalah membantu Walikota Dumai melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, Bidang Perlindungan, Jaminan dan Penanganan Bencana serta Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat;
2. Penyiapan perumusan kebijakan/peraturan sebagai kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat;
3. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat;
4. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat;
5. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan bidang pemberdayaan masyarakat; dan
6. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Dari uraian di atas, indikator kinerja utama yang ingin dicapai adalah:

1. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM);
2. Persentase kelurahan cepat berkembang;
3. Persentase PKK aktif;
4. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/Kota (indikator SPM).

2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dari analisis kinerja layanan SKPD maka tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tergolong memuaskan, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai coordinator bidang Pelayanan

Sosial telah mampu mengkoordinasikan pelayanan bidang kesejahteraan sosial sehingga ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dapat terjamin.

Ada beberapa faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepada daerah dan wakil kepada daerah terpilih ini juga akan menjadi penghalang bagi perumusan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan OPD. Hal kritis yang terkait dalam pelayanan SKPD adalah masih minimnya keahlian dan teknis pegawai.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme pelayanan kesejahteraan sosial;
2. Kemampuan sumber daya manusia yang masih terbatas;
3. Masih kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat kelurahan / desa sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pengembangan tahunan, contoh penyusunan prioritas usulan pembangunan;
5. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
6. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/ tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
7. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan.

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Bidang Rehabilitasi Sosial

1. Masih rendahnya peran lembaga masyarakat dalam menangani permasalahan sosial disebabkan terbatasnya sarana, prasarana dan SDM kelembagaan;
2. Rendahnya penanganan dan pelayanan sosial;
3. Masih tingginya masalah perdagangan manusia, PSK dan Napza di karenakan lokasi Dumai yang dekat Malaysia;
4. Tingginya masalah lanjut usia, anak dan penyandang disabilitas di Kota Dumai.

b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

1. Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah pedalaman (jumlah penduduk miskin);
2. Belum berkembangnya usaha bagi masyarakat miskin;
3. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengetahuan tanggap bencana;
4. Faktor geografis Kota Dumai yang menyebabkan banyaknya bencana alam dan sosial.

c. Bidang Pemberdayaan Sosial

1. Kurangnya jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang memadai baik dari kuantitas maupun kualitas.
2. Kurangnya data yang tersedia terkait Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kota Dumai.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Masih rendahnya peran lembaga masyarakat dalam menangani permasalahan sosial disebabkan terbatasnya sarana, prasarana dan SDM kelembagaan.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencanaan dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai mengalami peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi:

1. Cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Dinas Sosial dan

- Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai;
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif;
 3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, Lembaga masyarakat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sektor swasta;
 4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran;
 5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

2.4.1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD dan Hal Kritis yang Terkait dengan Pelayanan OPD

Secara umum peran Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan fungsi kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, pemberdayaan, perlindungan sosial, pemberian bantuan dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial yang diamanatkan dalam Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2009. Rehabilitasi sosial dimaksud memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial diberikan dalam bentuk motivasi, perawatan/pengasuhan, pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental spiritual, bimbingan social dan bimbingan lanjut. Pemberdayaan sosial merupakan suatu tindakan memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri dan meningkatkan peran serta dalam lembaga/perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Perlindungan sosial dimaksud untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, kelompok, keluarga atau masyarakat melalui bantuan sosial, advokasi sosial dan bantuan hukum.

Pemberian bantuan dan jaminan sosial suatu tindakan menjamin fakir

miskin, anak yatim piatu terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial agar kebutuhan dasarnya terpenuhi dan menghargai pejuang, perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan.

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai tahun 2023 cukup baik, hal ini disebabkan telah maksimalnya Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk merumuskan kebijakan teknis operasional, kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan bidang sosial, terutama penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan penanggulangan kemiskinan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif, efisien dan akuntabel.

2.4.2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD adalah kurangnya sarana dan prasarana, kurang profesionalisme aparatur disebabkan jumlah SDM yang tidak mencukupi dan rendahnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dibidang sosial.

2.4.3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDG'S (Millenium Development Goals)

Dampak terhadap pencapaian dari visi dan misi Kota Dumai akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi nasional.

2.4.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD

Tantangan dalam meningkatkan pelayanan OPD antara lain:

- 1) Belum optimalnya informasi tentang upaya-upaya dalam peningkatan kesejahteraan sosial
- 2) Belum optimalnya kinerja SDM bidang sosial
- 3) Belum tersedianya gedung kantor yang representative, sarana dan

prasarana yang belum memadai.

Peluang dalam peningkatan pelayanan OPD antara lain:

- 1) Adanya keinginan kuat masyarakat untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelayanan dalam berbagai aspek peningkatan kesejahteraan sosial.
- 2) Komitmen Kepala Daerah dan DPRD yang kuat dituangkan dalam MOU dengan perusahaan yang berada di Kota Dumai untuk bekerjasama dalam peningkatan kesejahteraan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

2.4.5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan.

Dari isu-isu penting tersebut diatas dapat di formulasikan dengan rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kesejahteraan sosial merupakan hak setiap manusia yang sudah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan dan Komunitas Internasional melalui Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) dengan kesepakatan menurunkan angka kemiskinan dunia (MDGS) Millenium Development Goals harus disukseskan.
- 2) Untuk meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial, agar diupayakan untuk memenuhi sarana dan prasarana yang representative.
- 3) Untuk mensukseskan kesejahteraan sosial perlu dukungan dan kerjasama semua pihak, khususnya Kepala Daerah, DPRD dan peran aktif masyarakat.

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang pembentukannya pada Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 34 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai. Atas dasar kondisi tersebut, maka rencana program dan

kegiatan, indikator kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024 telah sesuai dengan rencana program prioritas rancangan awal RKPD yang merupakan tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	100%	5.907.004.044	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	100%	6.307.004.044	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	100%	18.900.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	100%	18.900.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.100.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2.100.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	2.100.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	2.100.000	

4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	2.100.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	1 Dokumen	2.100.000
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.100.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dumai	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	2.100.000
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dumai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	6.300.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dumai	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	6.300.000
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.100.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dumai	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	2.100.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	100%	3.707.100.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	100%	3.707.100.000
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	3.700.000.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	28 Orang	3.700.000.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	5.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dumai	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 laporan	5.000.000

3	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dumai	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.100.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dumai	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2.100.000	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	100%	25.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	100%	25.000.000	
1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dumai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	25.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dumai	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 laporan	25.000.000	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	100%	80.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	100%	80.000.000	
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dumai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	51 Paket	30.000.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dumai	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	51 Paket	30.000.000	
2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dumai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	50.000.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Dumai	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	50.000.000	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	100%	424.004.044	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	100%	424.004.044	

1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dumai	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.000.000	
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	90.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dumai	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	90.000.000	
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dumai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dumai	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	10.000.000	
4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dumai	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	35.000.000	
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	50.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dumai	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	50.000.000	
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dumai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dumai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	15.000.000	
7	Penyediaan Bahan/Material	Dumai	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	Penyediaan Bahan/Material	Dumai	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	
8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	211.004.044	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dumai	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	211.004.044	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	100%	530.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	100%	530.000.000	

1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Dumai	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	125.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Dumai	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 unit	125.000.000	
2	Pengadaan Mebel	Dumai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	55.000.000	Pengadaan Mebel	Dumai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 unit	55.000.000	
3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dumai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	150.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dumai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 unit	150.000.000	
4	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dumai	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	200.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dumai	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	200.000.000	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	100%	807.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	100%	1.107.000.000	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	135.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan	135.000.000	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	20.000.000	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	650.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dumai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	950.000.000	Penambahan belanja Jasa TKPK

8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	100%	315.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dumai	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	100%	415.000.000	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dumai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	35.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dumai	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	35.000.000	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	150.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dumai	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14 unit	250.000.000	Adanya penambahan mobil dinas/operasional lapangan
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 unit	30.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dumai	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 unit	30.000.000	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dumai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dumai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	100.000.000	
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Dumai	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	100%	445.000.000	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Dumai	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	100%	715.000.000	
1	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	100%	445.000.000	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	100%	715.000.000	

1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten /Kota	Dumai	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	72 Orang	300.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	72 Orang	550.000.000	Penambahan Tali Asih Psm (Pekerja Sosial Masyarakat) dan Bimtek PSM
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten /Kota	Dumai	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	25.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	7 Orang	45.000.000	Penambahan Tali Asih TKSK
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8152 Keluarga	120.000.000	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8152 Keluarga	120.000.000	
III	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Dumai	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/ Kelurahan Asal	100%	10.000.000	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Dumai	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/ Kelurahan Asal	100%	10.000.000	
1	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Dumai	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/ Kelurahan Asal	100%	10.000.000	Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Dumai	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/ Kelurahan Asal	100%	10.000.000	

1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabu paten /Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Dumai	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10.000.000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabu paten /Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Dumai	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	10.000.000	
IV	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dumai	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	100%	705.000.000	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Dumai	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	100%	805.000.000	
1	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dumai	Persentase Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	705.000.000	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Dumai	Persentase Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100%	805.000.000	
1	Penyediaan Permakanan	Dumai	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	50.000.000	Penyediaan Permakanan	Dumai	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	Terdapat penambahan penerima manfaat yaitu disabilitas mental yang terlantar tidak memiliki keluarga dan tinggal menetap di rumah singgah.

2	Penyediaan Sandang	Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	30.000.000	Penyediaan Sandang	Dumai	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	30.000.000	
3	Penyediaan Alat Bantu	Dumai	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	Penyediaan Alat Bantu	Dumai	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dumai	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	30.000.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dumai	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	30.000.000	
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dumai	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	250.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dumai	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	250.000.000	
6	Pemberian Layanan Kedaruratan	Dumai	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Dumai	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	100.000.000	
7	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Dumai	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	25.000.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Dumai	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	25.000.000	
8	Pemberian Layanan Rujukan	Dumai	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	120.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Dumai	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	170.000.000	Karena meningkatnya Layanan Rujukan bagi Penyandang Disabilitas Mental yang terlantar dan perlu segera dirujuk karena keterbatasan tempat tidur di RSUD Kota Dumai

V	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dumai	Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	635.000.000	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Dumai	Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	100%	850.000.000	
1	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Dumai	Persentase anak terlantar yang dipelihara	100%	150.000.000	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Dumai	Persentase anak terlantar yang dipelihara	100%	150.000.000	
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Dumai	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	50.000.000	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Dumai	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	50.000.000	
2	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Dumai	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	50.000.000	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Dumai	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	50.000.000	
3	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Dumai	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	50.000.000	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Dumai	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	10 orang	50.000.000	
2	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dumai	Persentase fakir miskin cakupan daerah kab/kota yang terdata	100%	485.000.000	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Dumai	Persentase fakir miskin cakupan daerah kab/kota yang terdata	100%	700.000.000	
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Dumai	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	135.761 Orang	235.000.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Dumai	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	135.761 Orang	350.000.000	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data P3KE
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Dumai	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	30.530 Keluarga	100.000.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Dumai	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	30.530 Keluarga	150.000.000	Pemilahan data DTKS dan Calon DTKS

3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dumai	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7.751 Keluarga	150.000.000	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Dumai	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	7.751 Keluarga	200.000.000	Fasilitasi Penyaluran Bantuan Sosial (BANSOS) KPM PKH
VI	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dumai	Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	100%	500.000.000	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Dumai	Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	100%	850.000.000	
1	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dumai	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100%	250.000.000	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Dumai	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100%	250.000.000	
1	Penyediaan Makanan	Dumai	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	100.000.000	Penyediaan Makanan	Dumai	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	100.000.000	
2	Penyediaan Sandang	Dumai	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	50.000.000	Penyediaan Sandang	Dumai	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	50.000.000	

3	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Dumai	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	100.000.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Dumai	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 orang	100.000.000	
2	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dumai	Persentase Masyarakat yang diberdayakan terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100%	250.000.000	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Dumai	Persentase Masyarakat yang diberdayakan terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	100%	600.000.000	
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Dumai	Jumlah Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kab/kota	1 Kampung	50.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Dumai	Jumlah Kampung yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kab/kota	1 Kampung	100.000.000	Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat (Permensos RI nomor 128 tahun 2011 tentang kampung siaga bencana).
2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dumai	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	46 Orang	200.000.000	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Dumai	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	46 Orang	500.000.000	Peningkatan Kapasitas TAGANA : - TAGANA Masuk Sekolah - Perlengkapan Atribut TAGANA - Fasilitas Sarana Prasarana Operasional TAGANA
VII	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dumai	Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100%	150.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Dumai	Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	100%	150.000.000	
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dumai	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang terpelihara	100%	150.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dumai	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota yang terpelihara	100%	150.000.000	

1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Dokumen	100.000.000	
2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	55 Makam	50.000.000	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dumai	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	55 Makam	50.000.000	
VIII	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dumai	Persentase Kinerja dan Manajemen Aparatur Pemerintah Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan	100%	150.000.000	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Dumai	Persentase Kinerja dan Manajemen Aparatur Pemerintah Kelurahan dalam Perencanaan Pembangunan	100%	1.350.000.000	
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dumai	Persentase Profil Kelurahan yang sesuai dengan standar	100%	150.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dumai	Persentase Profil Kelurahan yang sesuai dengan standar	100%	1.350.000.000	
1	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Dumai	Jumlah Dokumen Profil Desa	36 Dokumen	50.000.000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Dumai	Jumlah Dokumen Profil Desa	36 Dokumen	1.200.000.000	Berdasarkan Permendagri No 12 Tahun 2007 , melakukan pendataan Data Dasar Kependudukan (DDK)
2	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	36 Dokumen	100.000.000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	36 Dokumen	150.000.000	Berdasarkan Permendagri No 81 Tahun 2015, Untuk pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan
IX	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dumai	Persentase LPM yang lebih Produktif dan Mandiri dalam Perencanaan Pembangunan	100%	760.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Dumai	Persentase LPM yang lebih Produktif dan Mandiri dalam Perencanaan Pembangunan	100%	1.850.000.000	

1	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta	Dumai	Persentase Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100%	760.000.000	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta	Dumai	Persentase Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100%	1.850.000.000	
1	Fasilitasi Penataan , Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW , PKK, Posyandu , LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	36 Dokumen	400.000.000	Fasilitasi Penataan , Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW , PKK, Posyandu , LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	36 Dokumen	1.100.000.000	1. surat dari ketua TP.PKK Provinsi Riau Nomor 02/Skr/PKK.Prov/I/2023, tanggal 02 Januari 2023 tentang pemberitahuan awal kegiatan HKG dan Jambore PKK tahun 2023 2.TP.PKK Provinsi Riau Nomor 16/Skr/PKK.Prov/I/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang informasi awal puncak acara peringatan Hari kesatuan gerak PKK ke – 51 Tahun 2023 . 3. Sarasehan istri Walikota
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW , PKK, Posyandu , LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dumai	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	36 Lembaga	100.000.000	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW , PKK, Posyandu , LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dumai	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	36 Lembaga	160.000.000	Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka Pencegahan dan Penurunan Stunting (Peraturan Walikota Dumai Nomor 111 tahun 2022 tentang Peranan Konvergensi Pencegahan dan Penurunan Stunting di Kota Dumai)
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	36 Dokumen	10.000.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dumai	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	36 Dokumen	50.000.000	Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat (Permendagri Nomor 6 Tahun 1998 tentang Usaha Ekonomi Kelurahan /UEK-SP)

4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dumai	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	36 Laporan	100.000.000	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dumai	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	36 Laporan	200.000.000	Berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna dan surat dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 2062/BPI.01.02/XI/2022 dalam hal pemberitahuan pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara (GTTGN) yang merupakan mandatory Presiden sebagai agenda tahunan
5	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royon g Masyarakat	Dumai	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	36 Laporan	50.000.000	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royon g Masyarakat	Dumai	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	36 Laporan	140.000.000	Berdasarkan Surat No. 412 /DPMD - DUKCAPIL /Pem Masy / 55 , tanggal 12 Januari 2023, tentang pelaksanaan Penilaian Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Tahun 2023
6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	50.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50 Keluarga	100.000.000	Berdasarkan Klasifikasi ,Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Kependagri 050-5889 tahun 2021) PKK
7	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	50.000.000	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Dumai	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50 Keluarga	100.000.000	Berdasarkan Klasifikasi ,Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota (Kependagri 050-5889 tahun 2021) PKK
					9.262.004.044						12.887.004.044

BAB III

PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah disepakati sebagaimana tersebut dalam Renstra OPD dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh OPD, Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024 berdasarkan Renja adalah 9 (sembilan) Program dan 18 (delapan belas) Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 27.649.042.320,-, sedangkan pada perubahan Renja Dinas Sosial dengan jumlah program dan kegiatan yaitu 9 (sembilan) program dan 19 (sembilan belas) Kegiatan dengan perubahan anggaran Renja sebesar Rp. 29.098.722.620,-

Berbagai bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai guna mencapai sasaran yang telah disepakati, diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu Program/Kegiatan Non-Urusan (Administrasi Umum), Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar. Adapun rencana program dan kegiatan yang akan diterapkan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai pada tahun 2024 yaitu :

A. Program dan Kegiatan Non-Urusan (Administrasi Umum) :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar :

1. Program Pemberdayaan Sosial

- Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota

2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

- Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal

3. Program Rehabilitasi Sosial

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
- Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial

4. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial

- Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar
- Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penanganan Bencana

- Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
- Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota

6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota

C. Program/Kegiatan Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar :

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

- Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang

Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun Perubahan rencana kerja dan pendanaan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai pada tahun 2024 dapat disajikan pada **tabel 3.1** berikut:

Tabel 3.1

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA SKPD TAHUN 2023

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024									Keterangan				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)			Kebutuhan Dana			
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Pagu (Rp)						
						Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan		Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
1	6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																
1	6	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
1	6	1	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	2.100.000	2.100.000	
1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2.100.000	2.100.000	
1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2.100.000	2.100.000	
1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2.100.000	2.100.000	
1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	2.100.000	2.100.000	

1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	6.300.000	6.300.000				
1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen/Laporan perencanaan, penganggaran dan	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	100 %	3 Laporan	3 Laporan	100 %	100 %	2.100.000	2.100.000				
1	6	1	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													4.313.940.860	5.004.050.000	690.109.140		
1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersusunnya Dokumen/Laporan administrasi keuangan	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	100 %	29 Orang/Bulan	29 Orang/Bulan	100 %	100 %	4.309.890.860	5.000.000.000	690.109.140	Penambahan Gaji dan Tunjangan ASN		
1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1.950.000	1.950.000				
1	06	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Dokumen/Laporan administrasi keuangan perangkat daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	100 %	2 Dokumen	2 Dokumen	100 %	100 %	2.100.000	2.100.000				
1	6	1	2,03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah													16.200.000	24.300.000	8.100.000		
1	06	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Barang Milik	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	16.200.000	24.300.000	8.100.000	Penambahan honorarium pengurus barang selama 4 bulan		
1	6	1	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah													11.000.000	-	-	11.000.000	
1	06	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	0	10 Orang	0	100 %	0	11.000.000	-	-	11.000.000	Penyelenggaraan Bimtek untuk tahun 2024 belum dapat diselenggarakan	

1	6	1	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah										283.043.600	336.737.600	53.694.000			
1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	100 %	1 Paket	1 Paket	100 %	100 %	2.246.000	2.246.000		
1	06	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	58.064.100	58.064.100		
1	06	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	7.057.100	7.057.100		
1	06	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	100 %	12 Paket	12 Paket	100 %	100 %	34.719.400	34.719.400		
1	06	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	100 %	100 %	20.821.000	20.821.000		
1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %	100 %	13.830.000	13.830.000		
1	06	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Dokumen/Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	146.306.000	200.000.000	53.694.000	Adanya peningkatan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan

1	6	1	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										145.507.900	400.000.000	254.492.100			
1	06	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	100 %	20 unit	40 unit	100 %	100 %	15.243.200	200.000.000	184.756.800	Penambahan Mebel kantor
1	06	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tersedianya Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	100 %	19 unit	53 unit	100 %	100 %	130.264.700	200.000.000	69.735.300	Penambahan Peralatan dan Mesin Kantor
1	6	1	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										1.119.940.440	1.166.225.500	46.285.060			
1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	1.500.000	1.500.000	-	
1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	100 %	2 Laporan	2 Laporan	100 %	100 %	129.345.000	129.345.000	-	
1	06	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	100 %	2 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	20.000.000	10.000.000	-	Biaya hias mobil pawai hari raya idul adha
1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	100 %	100 %	969.095.440	1.025.380.500	56.285.060	Penambahan Honorarium Bendahara, PA dan PPK selama 6 Bulan
1	6	1	2,09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										200.307.360	363.307.360	163.000.000			
1	06	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	100 %	2 unit	2 unit	100 %	100 %	35.000.000	35.000.000	-	

1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan masyarakat	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	100 %	14 unit	14 unit	100 %	100 %	136.757.360	149.757.360	13.000.000	Penyesuaian kebutuhan service kendaraan dinas dan operasional
1	06	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	100 %	100 %	45 unit	45 unit	100 %	100 %	28.550.000	28.550.000		
1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase penunjang urusan pemerintahan bidang sosial dan bidang pemberdayaan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Kota Dumai, Dumai Timur, Jaya Mukti	0	100 %	0	1 unit	0	100 %	0	150.000.000	150.000.000	ada penambahan pekerjaan yang belum selesai/semperna
1	6	2			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL										788.906.460	788.906.460			
1	6	2	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota										788.906.460	788.906.460	-		
1	06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	74 Orang	74 Orang	100 %	100 %	494.264.240	494.264.240		
1	06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	7 Orang	7 Orang	100 %	100 %	44.644.320	44.644.320		
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	8.152 Keluarga	8.152 Keluarga	100 %	100 %	99.997.900	99.997.900		

1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tersedianya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang diberdayakan	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2 Lembaga	2 Lembaga	100 %	100 %	150.000.000	150.000.000		
1	6	3			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN										10.000.000	10.000.000			
1	6	3	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal										10.000.000	10.000.000		-	
1	06	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/ Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/ Kelurahan Asal	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Orang	10 Orang	100 %	100 %	10.000.000	10.000.000		
1	6	4			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL										805.000.000	1.050.000.000			
1	6	4	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial										805.000.000	1.050.000.000	245.000.000		
1	06	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar panti sosial	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Orang	250 Orang	100 %	100 %	100.000.000	320.000.000	220.000.000	Bantuan Permakanan bagi Lansia Tunggal dan Disabilitas di Kota Dumai sebanyak 110 orang selama 60 Hari
1	06	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar panti sosial	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	100 %	100 %	30.000.000	30.000.000		

1	06	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar panti sosial	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	100 %	100 %	100.000.000	125.000.000	25.000.000	Banyaknya permintaan alat Aksesibilitas (Kursi Roda) bagi Penyandang Disabilitas, ditambah 10 (Sepuluh) Unit
1	06	04	2.01	04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar panti sosial	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	100 %	100 %	30.000.000	30.000.000		
1	06	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar panti sosial	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	100 %	100 %	250.000.000	250.000.000		
1	06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar panti sosial	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	100 %	100 %	100.000.000	100.000.000		
1	06	04	2.01	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar panti sosial	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	100 %	100 %	25.000.000	25.000.000		

1	06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang tertangani di Luar Panti Sosial	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar panti sosial	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	100%	100%	170.000.000	170.000.000			
1	6	4	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial											-	50.000.000	50.000.000		
1	6	4	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0%	100 %	0	10 Orang	0%	100 %	0	40.000.000	40.000.000		Pada anggaran murni tahun 2024 hanya dianggarkan untuk 6 bulan pada kegiatan di bidang rehsos, saat ini berdasarkan perwa 68 2023 telah terbentuk UPT Perlindungan sosial Serai Serumpun
1	6	4	2.02	0004	Penyediaan Sandang	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	0%	100 %	0	10 Orang	0%	100 %	0	10.000.000	10.000.000		
1	6	5			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL											17.297.764.000	17.297.764.000			
1	6	5	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar											150.000.000	150.000.000		-	
1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemantauan terhadap anak terlantar yang dipelihara	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Orang	10 Orang	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000			
1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak- Anak Terlantar	Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemantauan terhadap anak terlantar yang dipelihara	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Orang	10 Orang	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000			

1	06	05	2.01	0003	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Anak Terlantar yang Terantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemantauan terhadap anak terlantar yang dipelihara	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	10 Orang	10 Orang	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000		
1	6	5	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota											17.147.764.000	17.147.764.000	-	
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Terlaksananya pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	135.761 Orang	135.761 Orang	100 %	100 %	100.000.000	100.000.000		
1	06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	30.530 Keluarga	30.530 Keluarga	100 %	100 %	74.000.000	74.000.000		
1	06	05	2.02	0003	Fasilitasi bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Persentase pmks yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial Kesejahteraan keluarga kewenangan kab/kota	Terlaksananya pendataan fakir miskin cakupan daerah kab/kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	2.696 Keluarga	5.903 Keluarga	100 %	100 %	16.973.764.000	16.973.764.000		1. Bansos Kemiskinan Ekstrem = 2007 KPM 2. Bansos Warga Miskin = 1706 KPM 3. Bansos Disabilitas dan Lansia = 2060 KPM 4. Bansos Stunting = 130 KPM
1	6	6			PROGRAM PENANGANAN BENCANA											627.277.000	627.277.000		
1	6	6	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota											150.000.000	150.000.000	-	
1	06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	150 Orang	150 Orang	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000		
1	06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	200 Orang	200 Orang	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000		

1	06	06	2.01	04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	150 Orang	150 Orang	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000					
1	6	6	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota											477.277.000	477.277.000	-				
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Masyarakat yang diberdayakan terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		100 %	100 %	1 Kampung	1 Kampung	100 %	100%	100.000.000	100.000.000					
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial kab/kota yang tertangani	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Masyarakat yang diberdayakan terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota		100 %	100 %	48 Orang	48 Orang	100 %	100%	377.277.000	377.277.000					
1	6	7			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN											41.854.700	41.854.700					
1	6	7	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota											41.854.700	41.854.700	-				
1	06	07	2.01	02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	55 Makam	55 Makam	100 %	100 %	41.854.700	41.854.700					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA														1.969.400.000	1.969.400.000		
2	13	4			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA														270.000.000	270.000.000		
2	13	4	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa											270.000.000	270.000.000	-				
2	13	04	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Persentase Kelurahan yang Tertib Administrasi Pemerintahnya	Jumlah Dokumen Profil Desa	Tersedianya Profil Kelurahan yang sesuai dengan standar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	36 Dokumen	36 Dokumen	100 %	100 %	170.000.000	170.000.000					

2	13	04	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Persentase Kelurahan yang Tertib Administrasi Pemerintahnya	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Tersedianya Profil Kelurahan yang sesuai dengan standar	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	36 Dokumen	36 Dokumen	100 %	100 %	100.000.000	100.000.000		
2	13	5			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT											1.699.400.000	1.699.400.000		
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta											1.699.400.000	1.699.400.000		-
2	13	05	2.01	000 2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	36 Dokumen	36 Dokumen	100%	100%	1.099.400.000	1.099.400.000		
2	13	05	2.01	000 3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang aktif	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Terlaksananya Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	36 Lembaga	36 Lembaga	100 %	100 %	150.000.000	150.000.000		
2	13	05	2.01	000 5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang aktif	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	36 Dokumen	36 Dokumen	100 %	100 %	50.000.000	50.000.000		

2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang aktif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	36 Laporan	36 Laporan	100 %	100 %	100.000.000	100.000.000	
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang aktif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	36 Laporan	36 Laporan	100 %	100 %	100.000.000	100.000.000	
2	13	05	2.02	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang aktif	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Keluarga	50 Keluarga	100 %	100 %	100.000.000	100.000.000	
2	13	05	2.03	0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK) yang aktif	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya Kegiatan Kelembagaan Masyarakat Desa /Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kota Dumai, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	50 Keluarga	50 Keluarga	100 %	100 %	100.000.000	100.000.000	
TOTAL																27.649.042.320	29.098.722.620	1.449.680.300

KEPALA,

drg. HERMIYATI
Pembina Utama Muda
NIP. 19711229 200012 2 001

BAB IV

PENUTUP

a. Kesimpulan

Dengan adanya penetapan perubahan Rencana Kerja (Renja) periode 2024 ini, diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan Tupoksi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai terdapat serta memberikan gambaran bagi Pemerintahan Daerah untuk terus berupaya memperbaiki kinerja Perangkat Daerah dalam rangka pencapaian hasil kinerja.

Keberhasilan program kegiatan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dalam melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran yang diperoleh, mengingat Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai juga mengemban tugas penting dalam penyedia dokumen informasi.

Perubahan RENJA Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja OPD dimasa mendatang agar diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik ditahun berikutnya.

b. Catatan yang Perlu Mendapat Perhatian

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga dalam pelaksanaannya wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sehingga menjadi perhatian penting untuk Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai. Untuk mewujudkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tersebut maka dibutuhkan SDM yang kompeten dalam bidang Sosial, serta sarana dan prasarana yang memadai dan mendukung proses tersebut. Sedangkan, di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai hanya ada beberapa SDM yang Kompeten di bidang Sosial dan sarana prasarana yang kurang memadai untuk mewujudkan pelayanan tersebut.

c. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya

lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :
 1. Melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 2. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
- Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024.

d. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan Renja Tahun 2024, selanjutnya Perubahan Renja Tahun 2024 ini akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Dumai Tahun 2024 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan penganggaran pembangunan kesejahteraan sosial tahun 2024.

Dumai, 2024
KEPALA,

drg. HERMIYATI
PembinaUtama Muda
NIP. 19711229 200012 2 001